

Kajian Kelayakan Kecamatan Tanjungpandan Menjadi Kota Tanjungpandan

¹Rifky Pratama, ²Asep Hariyanto

^{1,2}Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹Rifky.ardikha@yahoo.com, ²Asepfrahari@gmail.com

Abstract. Tanjung Pandan sub-district is one of the districts in Belitung regency. According to the Spatial Plan of Belitung province 2014-2034 mentions that: Tanjungpandan sub-district is the center of the region and the Central Business District for Belitung regency. These conditions that exist today in Bangka Belitung province has only one town is Pangkalpinang as capital city, while the Bangka Belitung province have geographic archipelago with two major islands are Bangka and Belitung. Looking that reality, it very good if Tanjung Pandan sub-district can be used as a city in order to serve the society to the fullest in Belitung Island. It is also stated in the Spatial Plan Belitung regency which has said it will conduct a feasibility study Tanjungpandan sub-district into the Tanjungpandan city. This study aims to support the Government's efforts to make the Tanjungpandan sub-district as a city in order to help the public service. The method used in conducting a feasibility study to follow the Government Regulation No. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment, Consolidation and Elimination of Regions. From the results of studies conducted, it was found that Tanjungpandan sub-district to be rejected because the population of Belitung regency is concentrated in the Tanjungpandan sub-district. Therefore, government of Belitung regency is required to increase the number of residents in order to Belitung regency is ready to take off Tanjungpandan sub-district into the Tanjungpandan city.

Keywords: Feasibility, Tanjungpandan Sub-district, City.

Abstrak. Kecamatan Tanjungpandan adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung. Kecamatan Tanjungpandan merupakan pusat kegiatan wilayah dan *Central Business District* bagi Kabupaten Belitung menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung 2014-2034. Kondisi yang ada saat ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hanya memiliki satu kota yaitu Kota Pangkalpinang sebagai ibukota provinsi, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki geografis kepulauan dengan dua pulau utama yaitu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Memperhatikan hal tersebut, sangat baik jika di Kecamatan Tanjungpandan dapat dijadikan kota agar dapat melayani masyarakat Pulau Belitung secara maksimal. Hal tersebut juga tertuang dalam Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Belitung yang menyatakan akan melakukan studi kelayakan Kecamatan Tanjungpandan menjadi Kota Tanjungpandan. Penelitian ini bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah Daerah menjadikan Kecamatan Tanjungpandan sebuah kota guna membantu pelayanan masyarakat. Metode yang digunakan dalam melakukan kajian kelayakan mengikuti Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah. Dari hasil Kajian yang dilakukan, didapat bahwa Kecamatan Tanjungpandan ditolak untuk menjadi kota dikarenakan Penduduk Kabupaten Belitung terkonsentrasi di Kecamatan Tanjungpandan. Maka dari itu Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung diharuskan untuk menambah jumlah penduduk di Kabupaten Belitung agar Kabupaten Belitung siap untuk melepas Kecamatan Tanjungpandan menjadi Kota Tanjungpandan.

Kata Kunci : Kelayakan, Kecamatan Tanjungpandan, Kota.

A. Pendahuluan

Penataan wilayah pada dasarnya merupakan bagian dari manajemen pemerintahan daerah, yang dimaksudkan penataan wilayah pada dasarnya berguna untuk menata wilayah administratif suatu daerah agar rentang kendali dalam kesejahteraan menjadi lebih efektif dan efisien. Idealnya, penataan wilayah ini dilakukan seiring dengan perkembangan suatu daerah, sehingga pertumbuhan dan kemajuan tersebut tidak hanya terpusat tetapi dapat dinikmati secara merata di seluruh

wilayah. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan ekonomi yang baru biasanya menjadi awal bagi perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan ini sejalan dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.

Kecamatan Tanjungpandan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Belitung, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada sektor perdagangan dan jasa karena merupakan pusat Kabupaten Belitung. Selain itu Kecamatan Tanjungpandan menurut peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 adalah sebagai Central Bussines District dan menurut peta rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 adalah sebagai Pusat Kegiatan Wilayah.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi yang terdiri dari pulau-pulau di dalamnya dan terdapat dua buah pulau besar sebagai pulau utama dimana terkonsentrasinya masyarakat pada dua pulau utama ini. Dua pulau utama yang dimaksud adalah Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini mempunyai satu pusat utama yaitu Kota Pangkalpinang di Pulau Bangka untuk pelayanan seluruh kabupaten, namun kondisi yang terjadi adalah Kota Pangkalpinang hanya efektif untuk melayani Masyarakat di Pulau Bangka karena terkendala oleh ruang laut yang membatasi. Masyarakat Pulau Belitung menggunakan Kecamatan Tanjungpandan sebagai pusat untuk melayani seluruh Pulau Belitung. Karenanya pelayanan akan lebih optimal jika di Pulau Belitung juga terdapat pusat yaitu kota.

Dalam Perda Kabupaten Belitung No.3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2014-2034, pada pasal 41 ayat 2 tentang perwujudan PKW Tanjungpandan, menyebutkan akan dilakukannya pembangunan infrastruktur perkotaan dan akan melakukan studi kelayakan pemekaran Kecamatan Tanjungpandan sebagai Kota, dan sejumlah point lainnya yang menjadikan indikasi bahwa Kecamatan Tanjungpandan akan dijadikan Kota.

Karenanya perlu dilakukan kajian tentang kelayakan Kecamatan Tanjungpandan menjadi Kota Tanjungpandan, untuk mengetahui bagaimana kelayakan Kecamatan Tanjungpandan menjadi Kota Tanjungpandan sebagai pusat pelayanan tidak hanya untuk Kabupaten Belitung melainkan untuk Kabupaten Belitung Timur juga, terkait Kota Tanjungpandan berada pada satu wilayah kepulauan.

Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan, maka dirumuskan masalah dalam karya tulis ini tentang apakah layak Kecamatan Tanjungpandan untuk dijadikan kota. Adapun tujuan dari dibuatnya karya tulis ini guna mengetahui layak atau tidaknya Kecamatan Tanjungpandan dijadikan Kota Tanjungpandan. Selanjutnya diberikan rekomendasi yang sesuai agar menjadi salah satu masukan untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung dan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rencana persiapan Kecamatan Tanjungpandan menjadi Kota Tanjungpandan.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Kota

Pengertian mengenai kota yang kemudian lebih sering dijadikan acuan di Indonesia adalah tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas penduduknya. Dengan ungkapan berbeda, definisi kota yang

lain adalah permukiman yang berpenduduk relatif besar, luas areal terbatas, pada umumnya bersifat nonagraris, kepadatan penduduk relatif tinggi, tempat sekelompok orang dalam jumlah tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis, dan individualistis. (Ditjen Cipta Karya: 1997, Pengantar Perencanaan Perkotaan).

Secara umum pengertian kota dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu kota secara administrasi dan kota secara fungsional. Pengertian kota secara administrasi adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh suatu garis batas kewenangan administrasi pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kota secara fungsional adalah keterkaitan dengan pemenuhan ciri-ciri perkotaan secara fisik, sosial-demografis dan ekonomi, sehingga sering dipergunakan atau dipertukarkan dengan istilah yang lebih luas pengertiannya, yakni kawasan perkotaan. (Nia K. Pontoh dan Iwan Kustiwan, 2009: 15)

2. Pengertian Otonomi Daerah

Kajian yang dilakukan adalah tentang pembentukan daerah yang sangat erat hubungannya dengan otonomi daerah. Merujuk pada pengertian-pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:992), otonomi adalah pola pemerintahan sendiri. Sedangkan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah definisi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Syafrudin (1991:23) mengatakan bahwa otonomi mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

3. UU No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Daerah

Komponen penilaian dalam persyaratan teknis untuk daerah otonom baru menurut lampiran PP No. 78 Tahun 2007 terdapat 11 faktor yaitu : kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kemampuan keuangan, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, tingkat kesejahteraan dan rentang kendali. Dimana terdapat 4 faktor penyisih yaitu kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah dan kemampuan keuangan. Penilaian dilakukan dengan cara membandingkan tiap faktor Kecamatan Tanjungpandan dengan faktor kota-kota sekitar, dalam kajian ini dibandingkan dengan Kota Prabumulih, Kota Pagaralam dan Kota Lubuk Linggau.

Selanjutnya membandingkan tiap faktor Kabupaten Belitung selaku wilayah induk dengan tiap faktor kabupaten-kabupaten sekitar, dalam kajian ini dibandingkan dengan Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur. Proses akhirnya adalah pembobotan dari tiap faktor yang telah dinilai setelah didapat bobotnya dilakukan penjumlahan seluruh faktor dan barulah dapat diketahui hasil dari kelayakan wilayah calon dan wilayah induk.

Tabel 2.1 Kategori Kelulusan Persyaratan Teknis

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
sangat mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
kurang mampu	260	s/d	339	Ditolak
tidak mampu	180	s/d	259	Ditolak
sangat tidak mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007

Selain itu faktor penyisih akan memisahkan perhitungan total dengan perhitungan faktor keseluruhan. Rentang nilai untuk faktor penyisih adalah faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah ditolak apabila nilai keseluruhan faktor daerah calon dan daerah induk tidak mampu mencapai kriteria yang sudah ditetapkan dan faktor penyisih tidak mencapai kriteria.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis kelayakan Kecamatan Tanjungpandan untuk dijadikan Kota Tanjungpandan mengacu pada persyaratan teknis yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.

1. Analisis Kelayakan Teknis Kecamatan Tanjungpandan

Dari hasil penelitian setelah dilakukan pendataan dari tiap faktor, perbandingan dengan 3 kota, penilaian pada tiap faktor dan pembobotan. Didapatlah hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1 Hasil Pembobotan Kecamatan Tanjungpandan

No	Faktor Penilaian	Nilai Setelah Pembobotan
1	Kependudukan	85
2	Kemampuan Ekonomi	75
3	Potensi Daerah	64
4	Kemampuan Keuangan	65
5	Sosial Budaya	24
6	Sosial Politik	20
7	Luas Daerah	13
8	Pertahanan	19
9	Keamanan	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25
11	Rentang Kendali	25
Jumlah		440

Sumber : Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007

2. Analisis Kelayakan Teknis Kabupaten Belitung

Dari hasil penelitian setelah dilakukan pendataan dari tiap faktor, perbandingan dengan 3 kabupaten, penilaian pada tiap faktor dan pembobotan. Didapatlah hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Hasil Pembobotan Kabupaten Belitung

No	Faktor Penilaian	Nilai Setelah Pembobotan
1	Kependudukan	65
2	Kemampuan Ekonomi	75
3	Potensi Daerah	75
4	Kemampuan Keuangan	65
5	Sosial Budaya	25
6	Sosial Politik	22
7	Luas Daerah	20
8	Pertahanan	19
9	Keamanan	25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25
11	Rentang Kendali	25
Jumlah		441

Sumber : Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007

3. Analisis Proyeksi Penduduk

Analisis proyeksi penduduk digunakan untuk melihat perkembangan Kabupaten Belitung dimasa yang adakan datang tanpa Kecamatan Tanjungpandan. Analisis proyeksi penduduk yang akan dipakai adalah analisis bunga berganda terkait pembangunan yang akan dilakukan pada empat kecamatan di Kabupaten Belitung akan membuat pertambahan penduduk dalam jumlah yang besar. Proyeksi penduduk dilakukan dari tahun 2015-2035. Hasil dari proyeksi penduduk dengan analisis bunga berganda adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Hasil Proyeksi Penduduk

No	Kecamatan	Tahun Proyeksi				
		2015	2020	2025	2030	2035
1	Membalong	26.518	33.443	42.178	53.193	67.084
2	Badau	14.147	17.571	21.823	27.105	33.664
3	Sijuk	29.373	35.224	42.241	50.656	60.747
4	Selat nasik	6.307	6.695	7.106	7.543	8.006
Jumlah		76.345	92.933	113.348	138.496	169.502
Kabupaten Belitung		76.345	92.440	111.927	135.523	164.094

Sumber : Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Kecamatan Tanjungpandan mendapat perolehan nilai 440 (masuk kategori sangat mampu) dari semua faktor dan dinyatakan mampu untuk menjadi kota.
- Faktor-faktor penting untuk analisis teknis Kecamatan Tanjungpandan memperoleh nilai faktor kependudukan 85 dengan rentang nilai 80-100, faktor kemampuan ekonomi 75, faktor potensi daerah skor 65, faktor kemampuan keuangan skor 65 dengan rentang nilai 60-80,
- Kabupaten Belitung di analisis tanpa Kecamatan Tanjungpandan mendapat perolehan nilai 441 (masuk kategori sangat mampu) dari semua faktor
- Faktor-faktor penting untuk analisis teknis Kabupaten Belitung memperoleh nilai faktor kependudukan 65, faktor kemampuan ekonomi 75, faktor potensi daerah 75 dan faktor kemampuan keuangan 65.
- Kabupaten Belitung dinyatakan tidak mampu untuk membentuk sebuah kabupaten baru jika Kecamatan Tanjungpandan menjadi kota dikarenakan faktor kependudukan yang hanya mendapat nilai 65 untuk faktor kependudukan.
- Kecamatan Tanjungpandan ditolak untuk menjadi kota dikarenakan Kabupaten Belitung yang belum siap dari bagian kependudukannya untuk terpisah administrasi dari Kecamatan Tanjungpandan.
- Hal ini menandakan kondisi yang terjadi sekarang adalah konsentrasi penduduk yang cukup tinggi di Kecamatan Tanjungpandan atau dapat dikatakan penyebaran penduduk di Kabupaten Belitung belum merata. Menyebabkan Kabupaten Belitung yang penduduknya terlalu sedikit jika Kecamatan Tanjungpandan dimekarkan menjadi kota.
- Untuk itu dilakukan analisis proyeksi penduduk untuk melihat kesiapan Kabupaten Belitung untuk siap melepas Kecamatan Tanjungpandan menjadi sebuah kota. Dari hasil analisis yang dilakukan, Kabupaten Belitung siap menjadi kabupaten sendiri tanpa Kecamatan Tanjungpandan rentang tahun 2020-2025.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2013. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Bintarto (1983) dalam Pontoh, K Nia dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung : ITB.
- Branch (1995) dalam Pontoh, K Nia dan Kustiwan, Iwan. 2009. *Pengantar Perencanaan Perkotaan*. Bandung : ITB.

- Firdaus, Enang M. 2013. Skripsi Pembentukan Daerah Otonom Baru Kabupaten Pangandaran. Skripsi pada FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Parioribo, Yoram. 2013. Jurnal Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Napa Swandiwe dari Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. (Online) (<http://ejournal.unsrat.ac.id>, 14 april 2015)
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Research & Development. Bandung : Alfabeta.
- Suwaryo, Utang, Dkk, Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran. 2008. Studi Kelayakan Pemerakan Wilayah Kabupaten Cianjur. Cianjur : Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Trisnawati, Dian. 2013. Pemekaran Daerah di Kabupaten Bindan (Studi kasus Pemekaran Kabupaten Bintan Timur) (Online) (<http://jurnal.umrah.ac.id>, 14 april 2015)
- , 2011, Dasar Hukum Otonomi daerah. (Online), (<http://otonomidaerah.com/category/dasar-hukum-otonomi-daerah/>, diakses 7 april 2015)
- Badan Pusat Statistik. 2015. Pagar Alam Dalam Angka 2015. Pagar Alam : Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Prabumulih Dalam Angka 2015. Prabumulih : Badan Pusat Statistik Kota Prabumulih.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Lubuklinggau Dalam Angka 2015. Lubuklinggau : Badan Pusat Statistik Kota Lubuklinggau.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Sumatera Selatan Dalam Angka 2015. Palembang : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumtaera Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2010-2015. Belitung Dalam Angka 2010-2015. Belitung : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Bangka Selatan Dalam Angka 2015. Bangka Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Bangka Dalam Angka 2015. Bangka : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Belitung Timur Dalam Angka 2015. Belitung Timur : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur.
- Badan Pusat Statistik. 2015. Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2015. Pangkalpinang : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Badan Pusat Statistik. 2010-2015. Kecamatan Tanjungpandan Dalam Angka 2010-2015. Belitung : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Wilayah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah. Jakarta.

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

